

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembangunan industri tambak udang di Desa Lapa Daya Kabupaten Sumenep melalui pendekatan ekonomi-politik. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana praktik relasi bisnis dan politik yang terjalin antara elit lokal pemerintah daerah (birokrat, aparat desa serta tokoh agama desa) dan investor tambak udang. Agar penelitian ini menyajikan data yang lebih komprehensif, penelitian ini juga membahas bagaimana latar belakang kemunculan, apa dampak yang dihasilkan, serta bagaimana dinamika konflik yang terjadi dalam proses pembangunan industri tambak udang di Desa Lapa Daya. Penelitian ini menggunakan dua konsep, pertama relasi kuasa di tingkat lokal pasca Orde Baru. Kemudian yang kedua ialah konsep *rent seeking*. Konsep ini digunakan untuk membedah bagaimana perilaku elit lokal dan pengusaha dalam melakukan praktik pertukaran jasa (kongkalikong) dengan menggunakan rente sebagai media perekatnya.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, dengan analisis *stakeholder mapping* sebagai *tools* untuk membedah siapa saja aktor yang terlibat apa saja kepentingannya dan seperti apa interaksi antar aktor yang berkepentingan dalam pembangunan industri tambak udang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan tambak udang di Desa Lapa Daya, Kabupaten Sumenep di satu sisi ternyata melanggar aturan tata ruang yang ada, di sisi yang lain juga berdampak negatif seperti adanya proletarianisasi, keretakan sosial, eksklusi akses bagi nelayan serta limbah yang dihasilkan juga menimbulkan dampak lingkungan. Hal itulah yang kemudian memancing resistensi dari masyarakat sipil, sehingga sempat menimbulkan konflik antara aliansi masyarakat sipil (BATAN) *vis a vis* Pemerintah Daerah, Aparat Desa dan pihak perusahaan (PT AIL). Penelitian ini juga membuktikan bahwa dalam pembangunan industri tambak udang tersebut ternyata juga diwarnai oleh praktik *rent seeking* baik dalam pembebasan lahan maupun dalam proses perizinannya. Dalam pembebasan lahan misalnya, praktik *rent seeking* dilakukan oleh Aparat Desa dan Pihak Perusahaan. Sedangkan dalam proses perizinan melibatkan; Bupati, BPPT Sumenep dan Pihak perusahaan.

Kata Kunci: Ekonomi-Politik, Tambak Udang, Rent-Seeking, Relasi Kekuasaan,

Abstract

This study aims to examine the building of shrimp pond industry in Lapa Daya village, Sumenep regency through economic-political approach. The focus of this research is to explain how business and political relationships are intertwined between local government elites (local governments, village bureaucrats and village religious leaders) and shrimp pond investors. In order for this research to present more comprehensive data, this study also discusses how the background of emergence, what impacts are generated, and how the dynamics of conflict that occurred in the process of shrimp pond industry development in Lapa Daya Village. This study uses two concepts, the first power relations at the local level after the New Order. Then the second is the concept of rent seeking. This concept is used to dissect how the behavior of local elites and employers in the practice of exchange services (collusion) by using rent as adhesive media.

This research method uses case study research, with stakeholder mapping analysis as a tool to dissect who actors who are involved in what interests and what kind of interaction between actors who are interested in shrimp pond industry development. The results of this study indicate that the development of shrimp ponds in Lapa Daya Village, Sumenep Regency on the one hand violate existing spatial rules, on the other hand also have negative impacts such as the proletarianization, social rift, asks exclusion for fishermen and waste generated also cause environmental impact. This then provoked the resistance of civil society, causing a conflict between civil society alliance (BATAN) vis a vis Local Government, Village Officers and the company (PT AIL). This research also proves that in shrimp farming industry development it is also colored by rent seeking practice both in land acquisition and in licensing process. In land acquisition, for example, rent seeking practices are carried out by Village Officers and Company Parties. While in the licensing process involves; Bupati, BPPT Sumenep and the company.

Keywords: political-economy, shrimp farming industry, rent-seeking, power relation

